

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu negara karena mencerminkan peningkatan kapasitas produksi, aktivitas ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam teori ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa secara berkelanjutan dari waktu ke waktu sehingga menjadi salah satu indikator utama untuk menilai kinerja perekonomian suatu negara (Simangunsong et al., 2023).

Dalam perekonomian modern, pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang berkaitan dengan pengelolaan penerimaan negara dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan penerimaan negara serta pengeluaran pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan. Penerimaan pajak menjadi sumber utama pendapatan negara, sedangkan pengeluaran pemerintah digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta berbagai program pembangunan ekonomi. Menurut teori ekonomi makro, kebijakan fiskal dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. (Latifah & Rosyadi, 2024)

Dalam konteks Indonesia, kebijakan fiskal menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai Produk Domestik Bruto Indonesia atas dasar harga konstan terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. PDB ADHK

Indonesia meningkat dari Rp6.864.133,1 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp12.920.532,4 miliar pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya ekspansi aktivitas ekonomi nasional dalam jangka panjang, meskipun pertumbuhan ekonomi tidak selalu berlangsung secara stabil setiap tahunnya. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perkembangan aktivitas ekonomi nasional dalam jangka panjang (Badan Pusat Statistik, 2024).

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode penelitian, perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproksikan menggunakan PDB ADHK tahun 2010–2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 1.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang diproksikan menggunakan PDB ADHK Tahun 2010–2024 (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik (2025), diolah penulis (2026).

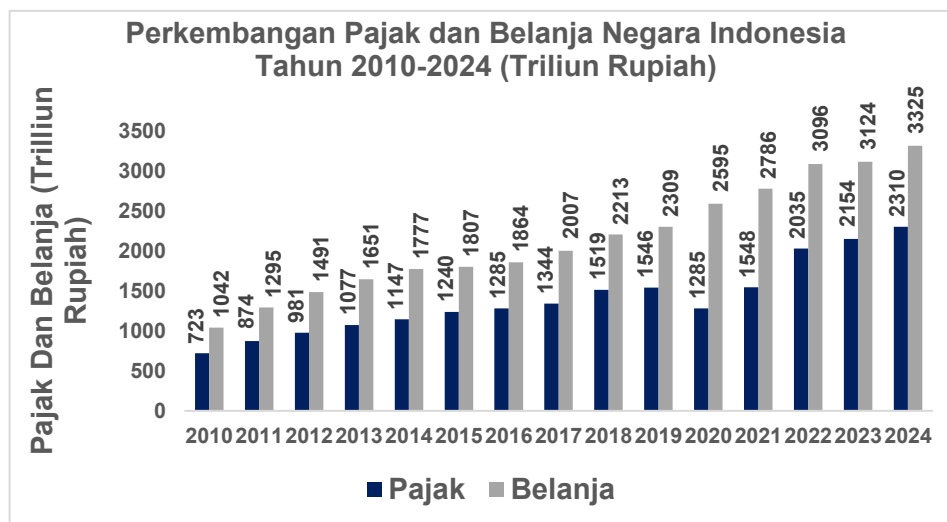
Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproksikan menggunakan PDB ADHK mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Pada beberapa tahun sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi relatif stabil pada kisaran lima persen. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19 yang

menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi secara signifikan. Setelah periode tersebut, pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan pemulihan seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian nasional. Produk Domestik Bruto atas dasar harga konstan pada dasarnya merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara karena mencerminkan nilai output riil yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu. Oleh karena itu, dalam penelitian ini PDB atas dasar harga konstan digunakan sebagai proksi untuk merepresentasikan pertumbuhan ekonomi dalam analisis empiris.

Pada periode yang sama, penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah juga mengalami peningkatan. Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara memiliki peran penting dalam membiayai berbagai program pembangunan. Sementara itu, pengeluaran pemerintah digunakan untuk menyediakan berbagai layanan publik serta mendukung pembangunan ekonomi. Total pengeluaran negara meningkat dari Rp1.042.117,2 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp3.325.118,9 miliar pada tahun 2024, yang menunjukkan semakin besarnya peran pemerintah dalam aktivitas ekonomi nasional. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin besarnya peran pemerintah dalam mendorong aktivitas ekonomi melalui kebijakan fiskal.

Untuk melihat perkembangan penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah di Indonesia selama periode penelitian, data tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 1.2 Perkembangan Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah di Indonesia Tahun 2010–2024 (Triliun Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik data diolah, (2026).

Berdasarkan Gambar 1.2 terlihat bahwa penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat dalam jangka panjang. Peningkatan penerimaan pajak mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas fiskal negara untuk membiayai pembangunan nasional. Sementara itu, pengeluaran pemerintah terus meningkat sebagai bentuk intervensi negara dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Dalam perspektif Keynesian, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen penting dalam permintaan agregat yang mampu meningkatkan output nasional melalui efek multiplier. Peningkatan belanja pemerintah dapat mendorong permintaan barang dan jasa, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat (Al-Kasasbeh, 2023). Selain itu, penerimaan pajak yang tinggi juga dapat memperkuat kemampuan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Dengan demikian, secara teoritis peningkatan penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah seharusnya

mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diproksikan menggunakan PDB ADHK suatu negara. Namun demikian, kondisi empiris di Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan kedua variabel tersebut tidak selalu diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Selain faktor domestik, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh dinamika global, salah satunya adalah konflik geopolitik internasional. Konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran merupakan salah satu faktor eksternal yang signifikan dalam memengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi global maupun domestik, terutama melalui transmisi guncangan pada harga energi, ketidakpastian pasar, dan disrupsi perdagangan internasional (Endang et al, 2026). Secara empiris, kawasan Timur Tengah sebagai pusat produksi minyak dunia memiliki peran strategis, sehingga eskalasi konflik di wilayah tersebut cenderung memicu lonjakan harga minyak global akibat terganggunya pasokan dan meningkatnya premi risiko geopolitik. Kenaikan harga minyak ini selanjutnya menimbulkan tekanan inflasi melalui mekanisme cost-push, meningkatkan biaya produksi sektor riil, serta menurunkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Estrada et al. (2020) menunjukkan bahwa simulasi konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Iran dapat menyebabkan peningkatan signifikan harga minyak dunia tergantung pada intensitas eskalasi konflik, sementara Zhang et al. (2023) menegaskan bahwa ketegangan geopolitik berkontribusi terhadap volatilitas harga energi yang berdampak negatif terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi global. Selain itu, Hu et al. (2021) menemukan bahwa konflik internasional dan sanksi ekonomi terhadap Iran berpotensi mengganggu keamanan energi global dan menghambat pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi

negara-negara yang bergantung pada impor energi. Dalam konteks Indonesia sebagai negara net importer minyak, kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya beban fiskal melalui kenaikan subsidi energi dalam APBN, tekanan inflasi domestik, serta penurunan konsumsi rumah tangga, yang secara simultan dapat menekan laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Meskipun faktor eksternal seperti konflik geopolitik dapat menekan pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal, salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia merupakan salah satu bentuk kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah yang tidak hanya berdampak pada peningkatan permintaan agregat dalam jangka pendek, tetapi juga berperan strategis dalam pembangunan modal manusia (human capital) dalam jangka panjang (Putri & Anam, 2025). Dalam perspektif Keynesian, peningkatan belanja pemerintah seperti program MBG akan mendorong aktivitas ekonomi melalui efek multiplier, di mana peningkatan konsumsi masyarakat akan merangsang produksi dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Imantria, 2025; Anitasari & Soleh, 2017). Lebih lanjut, dari sudut pandang teori pertumbuhan endogen, investasi pada sektor kesehatan dan gizi memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia, yang menjadi determinan utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Romer, 2021).

Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa program intervensi gizi seperti school feeding program memiliki dampak luas tidak hanya pada peningkatan kesehatan dan pendidikan, tetapi juga memberikan pengembalian ekonomi yang tinggi melalui peningkatan kapasitas produktif masyarakat (Verguet et al., 2020;

Bundy et al., 2018). Selain itu, intervensi gizi pada usia dini terbukti mampu meningkatkan kemampuan kognitif dan produktivitas individu di masa depan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan output ekonomi secara agregat (Nandi et al., 2017; Shrikant et al., 2020). Namun demikian, efektivitas program seperti MBG sangat bergantung pada kualitas implementasi dan efisiensi alokasi anggaran, karena apabila tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan tekanan fiskal, inefisiensi belanja, serta potensi crowding out terhadap sektor lain yang juga produktif (Johansson, 2016; Kousar et al., 2023). Oleh karena itu, meskipun program MBG memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui jalur konsumsi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, keberhasilannya sangat ditentukan oleh tata kelola kebijakan yang tepat dan berkelanjutan.

Dalam beberapa periode, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap mengalami fluktuasi meskipun penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti kondisi ekonomi global, struktur ekonomi domestik, efisiensi pengelolaan anggaran, dan tingkat konsumsi masyarakat. Pada tahun 2020, misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2,07% akibat pandemi COVID-19 meskipun pemerintah meningkatkan belanja negara untuk program pemulihan ekonomi nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah belum tentu langsung mampu mendorong pertumbuhan ekonomi apabila terjadi gangguan besar pada aktivitas produksi dan konsumsi. Selain itu, pajak yang terlalu tinggi juga dapat menurunkan pendapatan disposabel masyarakat sehingga berpotensi mengurangi konsumsi dan investasi

swasta (Poylov, 2023). Penurunan konsumsi dan investasi tersebut pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Oleh karena itu, hubungan antara penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi tidak selalu bersifat linear. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori yang menyatakan bahwa kebijakan fiskal mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan kenyataan empiris yang terjadi di Indonesia.

Selain adanya kesenjangan antara teori dan kondisi empiris, penelitian terdahulu juga menunjukkan hasil yang berbeda-beda mengenai pengaruh penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. (Nguyen & Darsono, 2022) menemukan bahwa penerimaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak dapat memperkuat kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Prasetyia et al. (2026) menjelaskan bahwa pengaruh pajak terhadap pertumbuhan ekonomi dapat berbeda tergantung pada jenis pajak yang diterapkan. Pajak yang terlalu tinggi dapat menurunkan investasi dan konsumsi, sedangkan sistem perpajakan yang efisien dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. (Abdelkawy & Al Shammre, 2024) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi apabila dialokasikan pada sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Sebaliknya, (Lakat et al., 2025) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah tidak selalu efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi apabila didominasi oleh belanja operasional dan belanja yang kurang produktif.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah, dan

pertumbuhan ekonomi masih memerlukan kajian empiris lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan bukti empiris terbaru mengenai pengaruh penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi yang diproksikan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) di Indonesia periode 2010–2024 yang mencakup kondisi sebelum, saat, dan sesudah pandemi COVID-19. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan time series dengan transformasi logaritma natural pada seluruh variabel penelitian untuk memperoleh distribusi data yang lebih stabil dan memudahkan interpretasi elastisitas hubungan antarvariabel. Selain itu, penelitian ini difokuskan pada kondisi Indonesia sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa kebijakan fiskal melalui penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah memiliki peran penting dalam mempengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun demikian, peningkatan penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah di Indonesia tidak selalu diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang sejalan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kedua instrumen fiskal tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya pada periode 2010–2024 yang mencakup kondisi sebelum, selama, dan setelah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penerimaan pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang diproksikan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) periode 2010-2024?

2. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang diproksikan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) periode 2010-2024?
3. Apakah penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang diproksikan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) periode 2010-2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang diproksikan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) periode 2010–2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang diproksikan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) periode 2010–2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan kajian kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi makro dan

ekonomi publik yang berkaitan dengan kebijakan fiskal. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur empiris mengenai hubungan antara penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi yang diproksikan menggunakan PDB ADHK, terutama dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memberikan tambahan bukti empiris mengenai bagaimana instrumen kebijakan fiskal berperan dalam mempengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan data runtut waktu periode 2010–2024 yang mencakup kondisi sebelum, selama, dan setelah pandemi COVID-19. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji hubungan antara variabel fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang diproksikan menggunakan PDB ADHK dengan pendekatan metodologi yang serupa maupun yang lebih lanjut.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan fiskal yang berkaitan dengan penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam memahami sejauh mana kedua instrumen fiskal tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang diproksikan menggunakan PDB ADHK, sehingga dapat membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan yang lebih efektif dan efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi bagi akademisi, peneliti, serta mahasiswa yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan demikian, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam mendukung pengambilan

keputusan yang berbasis data serta meningkatkan pemahaman berbagai pihak mengenai peran kebijakan fiskal dalam pembangunan ekonomi nasional.

1.5. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan batasan penelitian yang menjelaskan ruang lingkup serta fokus kajian yang dianalisis. Adapun batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada analisis pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi yang diproksikan menggunakan PDB ADHK di Indonesia dalam periode 2010–2024. Periode tersebut dipilih karena mencerminkan dinamika kondisi ekonomi Indonesia yang mencakup periode sebelum pandemi COVID-19, masa pandemi, serta periode pemulihan ekonomi setelah pandemi. Penelitian ini tidak menggunakan laju pertumbuhan ekonomi tahunan dalam bentuk persentase, melainkan menggunakan nilai PDB riil sebagai proksi pertumbuhan ekonomi.
2. Populasi dalam penelitian ini adalah data makroekonomi yang berkaitan dengan penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder berbentuk data runtut waktu (*time series*) tahunan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber resmi terkait lainnya.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel utama, yaitu:
 - 1) Variabel dependen (Y): Pertumbuhan ekonomi yang diproksikan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan (ADHK). Data diperoleh dari

Badan Pusat Statistik periode 2010–2024. Dalam analisis ekonometrika, variabel ini ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural.

- 2) Variabel independen (X1): Penerimaan pajak yang diukur berdasarkan total realisasi penerimaan pajak nasional yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik periode 2010–2024. Dalam analisis ekonometrika, variabel ini ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural.
- 3) Variabel independen (X2): Pengeluaran pemerintah yang diukur berdasarkan total realisasi belanja negara yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik periode 2010–2024. Dalam analisis ekonometrika, variabel ini ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural.
4. Penelitian ini hanya memfokuskan pada pengaruh penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi yang diproksikan menggunakan PDB ADHK, sehingga variabel lain yang juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti inflasi, investasi, suku bunga, ekspor, maupun faktor eksternal lainnya tidak dimasukkan dalam model penelitian.
5. Data variabel penelitian terlebih dahulu ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural sebelum dilakukan pengujian ekonometrika. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda menggunakan metode *Ordinary Least Squares (OLS)*. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi yang diproksikan menggunakan PDB ADHK di Indonesia. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, model regresi terlebih dahulu diuji

melalui uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Dengan adanya batasan penelitian ini, diharapkan penelitian dapat dilakukan secara lebih terarah, sistematis, serta sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.